

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI Keadilan RESTORATIF**

TESIS

**Oleh:
UMI KALSUM
NPM: 202020251028**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penghentian
Penuntutan Melalui Mediasi Penal Sebagai
Implementasi Keadilan Restoratif

Nama Mahasiswa : Umi Kalsum

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251028

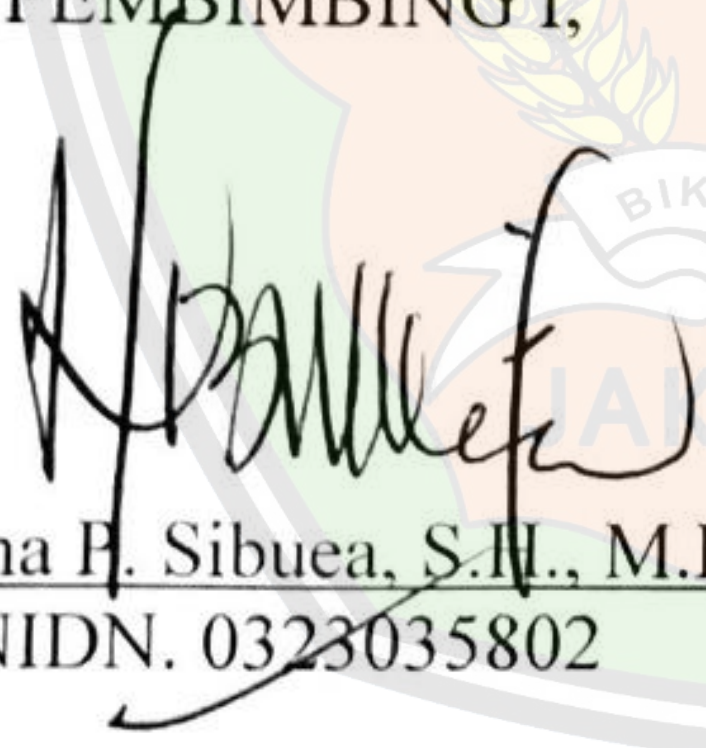
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

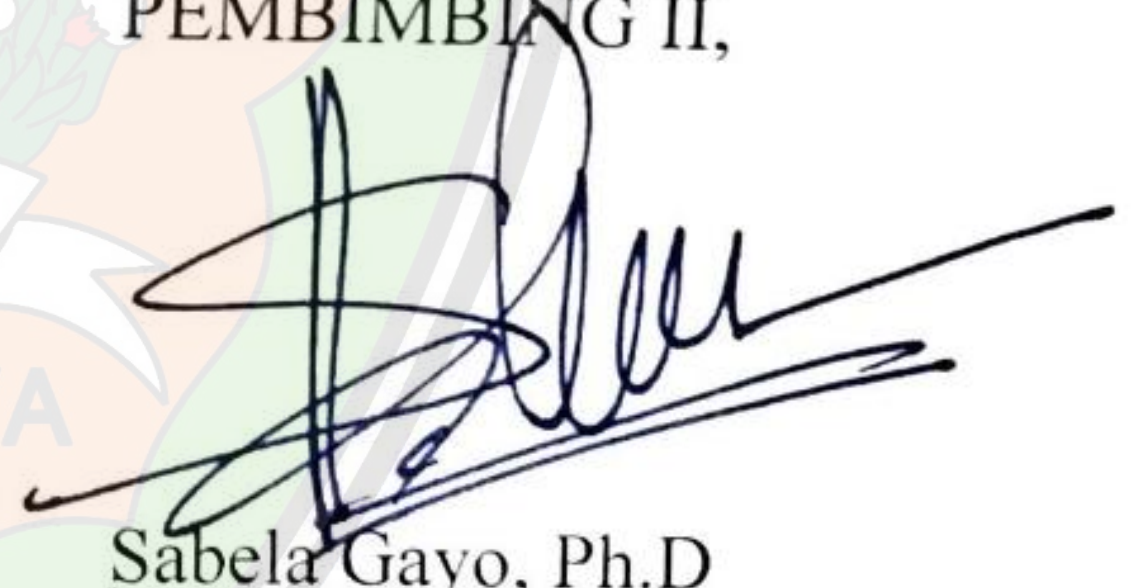
Bekasi, Juli 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum
NIDN. 0323035802


Sabela Gayo, Ph.D
NIDN. 0307078203

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Mediasi Penal Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif

Nama Mahasiswa : Umi Kalsum

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251028

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., Msi, CTA**
NIDN. 0304065402

Penguji I : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum**
NIDN. 0323035802

Penguji II : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF”, adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 24 Juli 2022

Umi Kalsum

NPM. 202020251028



**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF**

**(Umi Kalsum, Nomor BP : 202020251028, Program Pascasarjana Magister
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Jumlah Halaman: 85)**

ABSTRAK

Penuntut Umum ialah seorang jaksa yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan dengan menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatannya melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil, kemanfaatan serta perlindungan hukum untuk para pihak yang berperkara yang merupakan kewenangan jaksa dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Apakah pelaksanaan mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dapat membawa manfaat bagi korban? 2). Bagaimana pengaturan mediasi penal yang dapat bermanfaat bagi korban? Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori negara hukum Jimly Assiddiqie, perlindungan hukum Philipus Hadjon dan teori kewenangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data primer dan data sekunder. Fokus mengidentifikasi mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dan kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan mediasi penal melalui pendekatan keadilan restoratif belum mencerminkan sebagaimana dalam Pasal 30C huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena belum membawa manfaat bagi korban. 2) Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam mediasi penal dapat bermanfaat bagi korban apabila diatur secara tegas dalam peraturan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Perdamaian, Keadilan Restoratif, Kewenangan.

AUTHORITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN TERMINATION OF PROSECUTIONS THROUGH PENAL MEDIATION AS THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE

(Umi Kalsum, BP Number: 202020251028, Master of Laws Sciences Postgraduate Programs , Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University, Number of Pages: 85)

ABSTRACT

The Public Prosecutor is a prosecutor who by law is authorized to carry out prosecutions that are carried out independently for the sake of justice by weighing between legal certainty and its benefits through penal mediation. Penal mediation is the implementation of restorative justice that balances fair legal certainty, benefits and legal protection for litigants which are the prosecutor's authority in resolving cases outside the court, this is as regulated in Law Number 11 of 2021 amendments to Law - Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this study are 1). Can the implementation of penal mediation as the implementation of restorative justice bring benefits to the victim? 2). What are the penal mediation arrangements that can benefit the victim? The theories used in this study are the rule of law theory by Jimly Assiddiqie, the legal protection of Philipus Hadjon and the theory of authority. The method used in this research is descriptive qualitative with a normative legal research approach. The research data was collected through a literature study of primary and secondary data. The focus is identifying, knowing and analyzing the implementation of penal mediation as the implementation of restorative justice in the settlement of cases outside the court and the authority of the public prosecutor in stopping prosecution through penal mediation as the implementation of restorative justice. The results of the study show that 1) The implementation of penal mediation through a restorative justice approach has not reflected as stated in Article 30C letter d of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia because it has not brought benefits to victims. 2) The implementation of the peace agreement in penal mediation can benefit the victim if it is strictly regulated in the regulations.

Keywords: Prosecution, Termination of Prosecution, Peace, Restorative Justice, Authority.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **“KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF”**. Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan tesis dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Sabela Gayo, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin

saya sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak H. Amirudin dan Hj. Maemunah, kakak-kakak yang telah memberikan doa dan dukungan.
9. Suami dan anak-anak tercinta dan tersayang, Bapak Joko Siswanto, S.H., Ananda Muhammad Faiz Kaffah, Ananda Muhammad Dhafin Razaka dan Ananda Nayyara Audi Shafiq, terima kasih saying atas segala dukungan dan pengertiannya selama mamah (penulis) kuliah hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Kepada Pimpinan dan seluruh rekan-rekan di Bagian Sunproglapnil Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi, masyarakat dan Negara. Kepada semua pihak atas segala perhatian, pertolongan dan pengorbanannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, Juli 2022

Penulis,

Umi Kalsum

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
1.5.1 Kerangka Teoritis	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	19
1.6 Metode Penelitian	21
1.7 Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Negara Hukum	28

2.2	Teori Perlindungan Hukum	28
2.3	Teori Kewenangan	30
2.4	Hak-Hak Warganegara	33
2.5	Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	35
2.6	Keadilan Restoratif	38
2.7	Kewenangan dan Penghentian Penuntutan Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	44
2.8	Perdamaian	50

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN	53
---	-----------

BAB IV KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF	60
--	-----------

4.1	Kasus Posisi	69
4.2	Upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif	74

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN